



LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2017



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH. Wojo, Sewon, Yogyakarta 55187
Telp. (0274)436412, Fax. (0274)4396415
Website: <http://www.pt-yogyakarta.go.id>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 ini dapat kami sajikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan Laporan yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama tahun 2017, berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta diuraikan mengenai pencapaian (IKU) (Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2017.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2017, mempunyai 3 (Tiga) Program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berusaha secara maksimal agar ketiga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2018 telah disusun, namun masih belum sempurna. Oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat memacu Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta di masa yang akan datang.



Yogyakarta, 23 Februari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

HARYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19530419 198103 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	4
C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	6
D. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN	8
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta	14
B. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	24
BAB IV PENUTUP	25
BAB V LAMPIRAN	27
1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
2. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2017	
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2017	
5. Matriks Rencana Staretgis Review 2015-2019	
6. SK Penetapan IKU	
7. SK Penyusunan LKjIP	
6. Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta	

EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel.1 Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	87,75%	85,76%%	97,73%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	-24,24%	-242,4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	0%	0%	0%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	70%	73,81%	105,4 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	83,33%	83,33%	100%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 51 menyatakan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Banding yang diatur dalam undang-undang, dan diperjelas lagi yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas Pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai *Judicial Power*, yaitu :

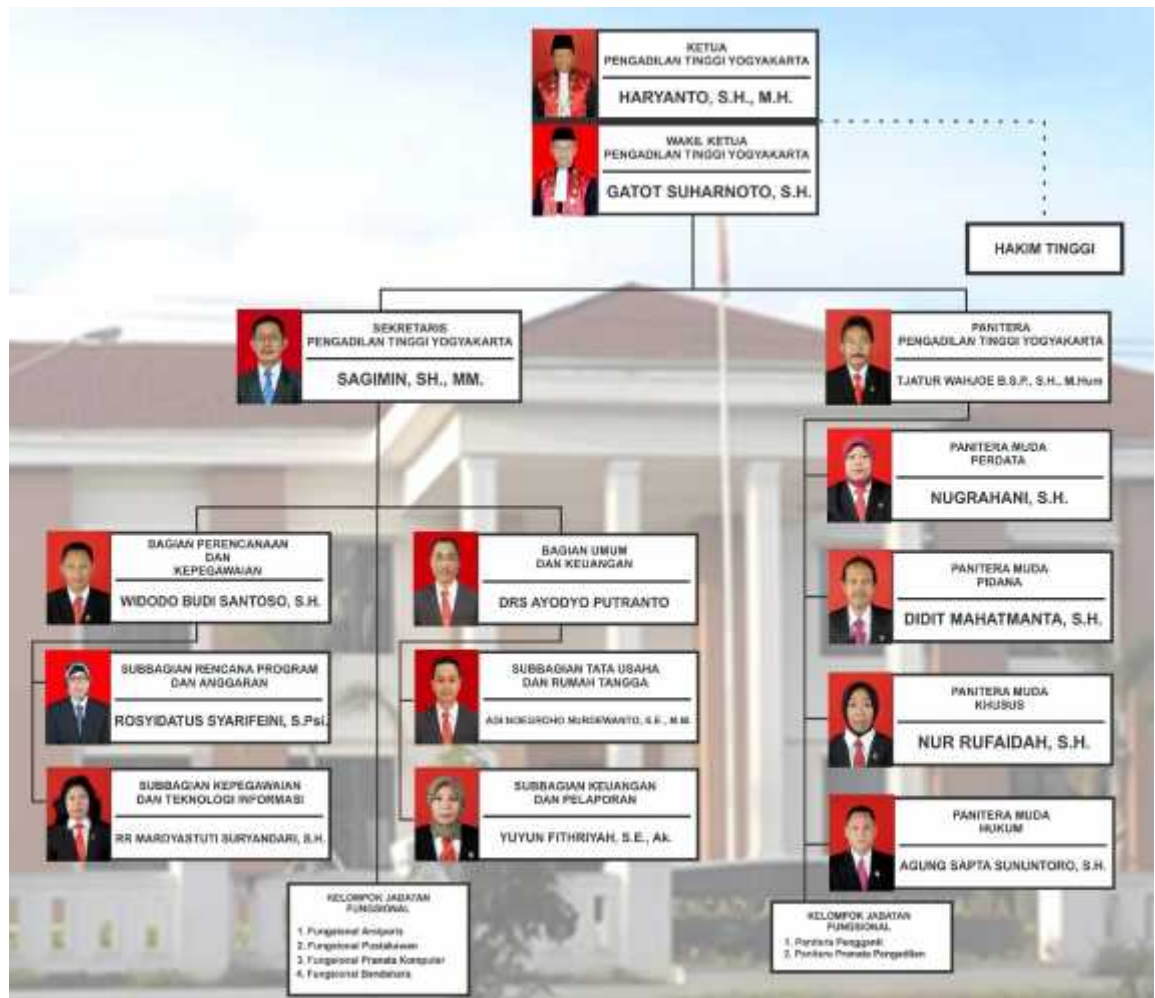
- a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, selanjutnya;
- b. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3. Fungsi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan PERMA 7 Tahun 2015.



Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata, pidana biasa, pidana anak dan tipikor di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Struktur Organisasi.

BAB II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Penetapan Kinerja.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

BAB IV - Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 - 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah "*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yang Agung*".

Penjelasan :

- a. Pengadilan Tinggi Yogyakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Umum di Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan **tujuan** yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel ;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis

Ada 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015 -2019, adapun sasaran strategis tersebut telah direview setelah di analisis target serta sasaran strategisnya (matriks review renstra terlampir).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituangkan dalam sepuluh sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan Rencana (Renstra) 2015 - 2019 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai berikut :

Tabel.2 Rencana Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	87,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	0%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	70%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	83,33%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 - 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel.3 Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	87,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none">• Kasasi• PK	0%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	70%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%

	penyelesaian perkara	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	83,33%
--	----------------------	---	--------

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.4 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	87,75%	85,76%	97,73%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	-24,24%	-242,4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	0%	0%	0%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	70%	73,81%	104,4%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	83,33%	83,33%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja melebihi dari target indicator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 mengacu pada dikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjaditanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan Transparan dan akuntabelnya penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator, yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara, Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi maupun PK, Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi yogyakarta.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel.5 target indikator kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
	URAIAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2016
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87,75%	85,76%	97,73%	-
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	-24,24%	-242,4%	-
	d. persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none">• Kasasi• PK	0%	0%	0%	-
	e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	70%	73,81%	105,4%	-

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tabel 6. Sisa Perkara yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2017	33	33	100	100	100
2016	41	41	100	100	100



Grafik 1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Keterangan :

Capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerja nya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2017.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 7. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	jumlah perkara yang ada	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2017	247	288	87,75%	97,73%	85,76%



Grafik 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Keterangan :

Capaian persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan 85,76% maka capaian kinerjanya 97,73%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi melebihi dengan target pada tahun 2017 karena pengawasan rutin yang dilakukan oleh panitera muda.

c. Persentase Penurunan sisa perkara

Tabel 8. Penurunan sisa perkara

Sisa Tahun Lalu	Sisa tahun berjalan	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
33	41	10%	-242,4%	-24,24%



Grafik 3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Keterangan :

Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan -24,24% maka capaian kinerjanya -242,4%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai dengan target pada tahun 2017 dikarenakan sisa perkara yang naik dari tahun sebelumnya.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK

Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memproses upaya hukum kasasi dan PK, akan tetapi untuk upaya hukum kasasi dan PK diproses di Pengadilan Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak dapat memberikan nilai pada target dan realisasi.

e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Tabel.8 Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014

Periode 2 Tahun 2017

NILAI : 73,81

Dalam skala B (Baik): 62,51 - 81,25: 2,51 - 3,25

Keterangan :

Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mencapai nilai 73,81 hal tersebut melebihi target yang telah ditentukan sebab pengadilan tinggi yogyakarta memberikan pelayanan yang terbaik.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu , Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 9. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
	URAIAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2016
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	83,33%	83,33%	100%	-

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tabel 10. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	salinan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah Putusan	Target	Realiasi	Capaian
2017	247	247	100%	100%	100%

Capaian persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerja nya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target pada tahun 2017.

Grafik 6.

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu



- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus**

Tabel 11

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Jumlah isi putusan perkara tipikor yang di upload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
15	18	83,33%	83,33%	100%

Grafik 7. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



Keterangan :

Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dapat direalisasikan 83,33% maka capaian kinerjanya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target pada tahun 2017.

Tercapainya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online.



Gambar 1. Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta

PERAGILAN TINGGI YOGYAKARTA
System Informasi Putusan

Daftar Perkara Perdata PT

No	No Perkara	Penyertaan Perkara	Klasifikasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 0007/2016/PT/PTK	Awal PT : PK Yogyakarta	PK Jaminan	Status Putus Belum Putus	Detail
	No Perkara PK : 001/2016/2016/PT/PTK	Tanggal Penetapan : 02 Desember 2016			
2	No Perkara PT : 0001/2016/PT/PTK	Awal PT : PK Sleman	Perbuatan Melawan Hukum	Status Putus Belum Putus	Detail
	No Perkara PK : 001/2016/2016/PT/PTK	Tanggal Penetapan : 03 Desember 2016			
3	No Perkara PT : 0001/2016/PT/PTK	Awal PT : PK Sleman	Perbuatan Melawan Hukum	Status Putus Belum Putus	Detail
	No Perkara PK : 001/2016/2016/PT/PTK	Tanggal Penetapan : 05 April 2016			
4	No Perkara PT : 0001/2016/PT/PTK	Awal PT : PK Sleman	Perbuatan Melawan Hukum dan Sewa Baku	Status Putus Belum Putus	Detail
	No Perkara PK : 001/2016/2016/PT/PTK	Tanggal Penetapan : 05 April 2016			

Gambar 3. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata

PERAGILAN TINGGI YOGYAKARTA
System Informasi Putusan

Daftar Perkara Pidana PT

No	No Perkara	Penyertaan Perkara	Klasifikasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 0001/2016/PT/PTK	Awal PT : PK Sleman	Kejahatan Terhadap Nyawa / Pembunuhan	Status Putus Belum Putus	Detail
	No Perkara PK : 001/2016/2016/PT/PTK	Tanggal Penetapan : 07 Desember 2016			
2	No Perkara PT : 0001/2016/PT/PTK	Awal PT : PK Sleman	Pencurian	Status Putus Belum Putus	Detail
	No Perkara PK : 001/2016/2016/PT/PTK	Tanggal Penetapan : 05 Desember 2016			
3	No Perkara PT : 0001/2016/PT/PTK	Awal PT : PK Sleman	UU Perjudian / Rokok	Status Putus Belum Putus	Detail
	No Perkara PK : 001/2016/2016/PT/PTK	Tanggal Penetapan : 05 Desember 2016			
4	No Perkara PT : 0001/2016/PT/PTK	Awal PT : PK Sleman	UU Lalu Lintas	Status Putus Belum Putus	Detail
	No Perkara PK : 001/2016/2016/PT/PTK	Tanggal Penetapan : 02 Oktober 2016			

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana

No	No Perkara	Pengadilan Banding	Waktu Hasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 4/100/SUS/106/2008/PT/PTK No Perkara PK : 26/10/2008/PTK/2008/PT/PTK	Aval PK : Korupsi dan pencucian uang Tanggal Penetapan : 23 Desember 2010	Tidak dapat diakses	Status Perkara: Belum Putus	Detail
2	No Perkara PT : 2/100/SUS/106/2008/PT/PTK No Perkara PK : 17/10/2008/PTK/2008/PT/PTK	Aval PK : Korupsi dan pencucian uang Tanggal Penetapan : 23 Desember 2010	Tidak dapat diakses	Status Perkara: Belum Putus	Detail
3	No Perkara PT : 2/100/SUS/106/2008/PT/PTK No Perkara PK : 10/10/2008/PTK/2008/PT/PTK	Aval PK : Korupsi dan pencucian uang Tanggal Penetapan : 23 Desember 2010	Tidak dapat diakses	Status Perkara: Belum Putus	Detail
4	No Perkara PT : 2/100/SUS/106/2008/PT/PTK No Perkara PK : 10/10/2008/PTK/2008/PT/PTK	Aval PK : Korupsi dan pencucian uang Tanggal Penetapan : 23 Desember 2010	Tidak dapat diakses	Status Perkara: Belum Putus	Detail

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Tipikor

Selain melalui melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara, Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam rangka keterbukaan informasi juga telah melaksanakan berbagai program yaitu :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Gambar 6. Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

B. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah dilakukan pembinaan, koordinasi, monitoring secara berjenjang dan berkala, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2016 dan 2017

NO. JENIS BELANJA	TAHUN 2016				TAHUN 2017			
	PAGU DIPA Rp	REALISASI Rp	%	SISA DANA Rp	PAGU DIPA Rp	REALISASI Rp	%	SISA DANA Rp
I	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA							
D. Pegawai	21.892.254.000	21.212.021.154	96,89%	680.232.846	26.867.193.000	26.708.014.033	99,41%	159.108.967
E. Barang Opr	1.136.285.000	1.134.905.722	99,88%	1.379.278	1.823.747.000	1.818.147.290	99,73%	7.599.710
F. Barang Non Opr	214.158.000	212.511.309	99,23%	1.646.691	130.608.000	130.536.700	99,95%	71.300
B. Modal	436.800.000	430.711.560	99,82%	358.000	525.000.000	524.910.000	99,98%	90.000
Jumlah 01	33.679.497.000	32.990.152.755	97,99%	689.344.345	29.348.508.000	29.181.638.023	99,43%	166.869.977
J. Barang (UJ)	65.435.000	65.840.700	99,10%	595.300	108.732.000	108.150.680	99,47%	581.320
Jumlah 03	66.435.000	65.840.700	99,10%	595.300	108.732.000	108.150.680	99,47%	581.320

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjapat kenaikan penyerapan anggaran sebesar 2,52% untuk belanja pegawai karena banyaknya mutasi masuk hakim dan pegawai pada tahun 2017.

2. Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional mengalami penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,30% karena adanya penurunan tagihan langganan listrik pada bulan Desember 2017.

3. Belanja Barang Operasional

Untuk belanja barang non operasional mengalami kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,72% karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dan adanya kebijakan-kebijakan baru di tahun 2017.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,16% untuk belanja modal karena banyaknya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2017.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja Barang

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,36% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (dipa badan peradilan umum) karena meningkatnya volume perkara dan para pencari keadilan pada tahun 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2017 yang dituangkan dalam 2 (dua) program beserta sasaran dan targetnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2017 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

B. SARAN

1. Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.

3. Optimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LKjIP dengan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP lebih optimal).

Yogyakarta, Februari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



HARYANTO, SH., MH

NIP.19530419 198103 1 001

BAB V
LAMPIRAN

1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2017
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
5. Matriks Rencana Strategis Review 2015 –2019
6. SK Penetapan IKU
7. SK Penyusunan LkjIP
8. Penghargaan yang telah diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2017

TABEL 13.REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan <p>(sisa awal tahun + perkara yang masuk) jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik</p>	panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan Pengaju}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat</p>	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara tipikor yang di upload dalam website}}{\text{jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Catatan : <ul style="list-style-type: none">• One Day Publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam satu hari setelah diputus• Maklumat Ketua MA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish		Tahunan
--	--	---	--	--	---------

TABEL 14.
REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN
TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. PK	0%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	70%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	83,33%

**TABEL 15. REVISI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87,75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 3. Kasasi 4. PK	0%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	70%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	83,33%

**TABEL 16. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	87,75%	85,76%%	97,73%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	-24,24%	-242,4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	0%	0%	0%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	70%	73,81%	105,4 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	83,33%	83,33%	100%

Tabel.15 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019.

- Tujuan : 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran
						2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	113.582.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	-	87,75%	87,75%	87,75%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor tepat waktu	
					c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10%	10%	10%				
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. PK	-	-	0%	0%	0%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan kualitas putusan perkara banding	

					e.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	-	-	70%	70%	70%			Mengumpulkan respon dari para pencari keadilan/ masyarakat melalui proses survey (Survey/ Index Kepuasan Masyarakat)	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	-	-	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu	166.500.000
					b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	83,33%	83,33%	83,33%	Pengembangan sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Program peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Peradilan	Publikasi putusan perkara dalam waktu 1 hari setelah diputus	



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/ 15 /SK/KPT/1/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
DAN REVIEW RENCANA STRATEGI TAHUN 2015-2019
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.1/11/2017 tertanggal 27 Nopember 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Kinerja Review Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Kinerja Review Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Review Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas menyusun Review Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2018

KETUA



HARYANTO, SH
NIP. 19530419 198103 1 001

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/ 15 /SK/KPT/1/2018
Tanggal : 2 Januari 2018

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS/WEWENANG
1	Haryanto, SH.,MH	Ketua	Pembina
2	Gatot Suharnoto, SH	Wakil Ketua	Pengarah
3	Tjatur Wahjoe, SH,M.Hum	Panitera	Koordinator
4	Sagimin, SH, MM	Sekretaris	Sekretaris
5	Nugrahani, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	Didit Mahatmanta, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Agung Sapta Sununtoro, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Nur Rufaidah, S.H	Panitera Muda Tipikor	Anggota
10	Drs.Ayodyo Putranto	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
11	Widodo Budi Santoso, SH	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
12	Rosyidatus Syarifeini, S.Psi	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota
13	Yuyun Fithriyah, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota
14	Mardiyastuti Suryandari, SH.	Kasubbag Kepegawaian	Anggota
15	Adi Noegroho Nurdewanto,SE.,MM	Kasubbag TU dan RT	Anggota
16	Setyawan Sigit	Staff	Operator
17	Nurhasanah, SH.	Staff	Anggota



KETUA,

HARYANTO, SH, MH

NIP : 19530419 198103 1 001



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/ 14/SK/KPT/1/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.1/11/2017 tertanggal 27 Nopember 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusun, monitoring dan evaluasi (monev) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2017
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2018

KETUA,



HARYANTO, SH

NIP. 19530419 198103 1 001

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Nomor : W13.U/ 14 /SK/KPT/1/2018

Tanggal : 2 Januari 2018

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS/ WEWENANG
1	Haryanto, SH.,MH	Ketua	Pembina
2	Gatot Suharnoto, SH	Wakil Ketua	Pengarah
3	Tjatur Wahjoe, SH,M.Hum	Panitera	Koordinator
4	Sagimin, SH, MM	Sekretaris	Sekretaris
5	Nugrahani, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	Didit Mahatmanta, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Agung Sapta Sununtoro, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Nur Rufaidah,S.H	Panitera Muda Tipikor	Anggota
9	Drs.Ayodyo Putranto	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Widodo Budi Santoso, SH	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
11	Rosyidatus Syarifeini, S.Psi	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota
12	Yuyun Fithriyah, SE.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
13	Mardiyastuti Suryandari, SH.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota
14	Adi Noegroho Nurdewanto,SE.,MM	Kasubbag TU dan RT	Anggota
15	Setyawan Sigit	Staff	Anggota
16	Nurhasanah, SH.	Staff	Anggota
17	Puri Widayanti, SE.	Staff	Anggota
18	Ferry Budiman, S.Si.	Staff	Anggota
19	RR. Nurahayu M, SH.	Staff	Anggota
20	Suprih Ibdiani,S.H	Staff	Anggota
21	Maria Angelina Anom,S.H	Staff	Anggota
22	Merina Kusumawati,S.H	Staff	Anggota
23	Muhammad Sholeh Nazaruddin. A.Md	Staff	Anggota



KETUA,

HARYANTO, SH., MH.

NIP : 19530419 198103 1 001

Penghargaan Yang Diterima Pengadilan Tinggi Yogyakarta



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10110

Nomor : 32.2/BUA/OT.01.1/2/2017
Lampiran : Dua lembar
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Program Kerja Triwulan IV Tahun 2016

27 Februari 2017

Yth.
(Daftar Terlampir)
Di Tempat

Disampaikan dengan hormat, ucapan terima kasih kepada Satker yang telah mengirimkan Laporan Triwulan IV Tahun 2016 aplikasi *e-monev* Bappenas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di lingkungan Eselon I Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan peradilan.

Selanjutnya dikirimkan hasil evaluasi Laporan Triwulan IV Tahun 2016 dari Satker Saudara (terlampir) sebagai bahan koreksi dan perbaikan dalam menetapkan target, merealisasikan kinerja anggaran dan realisasi kinerja fisik (*out put*) pada tahun 2017.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi

Dr. Drs. H. Aco Nur, MH

Tembusan:

1. Ketua Muda Pembinaan MA RI
2. Sekretaris MA RI.
3. Dirjen Badan Peradilan Umum.
4. Dirjen Badan Peradilan Agama.
5. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN.

GT.011-1297

Lampiran : Surat Kepala Badan Urusan Administrasi
Nomor : 32.2/BUA/OT.01.1/2/2017
Tanggal : 27 Februari 2017

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
11. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
12. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
13. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
- ✓14. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
15. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
16. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
17. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
18. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
19. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
20. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
21. Ketua Pengadilan Tinggi Palu
22. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
23. Ketua Pengadilan Tinggi Manado
24. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
25. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
26. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
27. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
28. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
29. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
30. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

3. Berdasarkan tabel tersebut di atas:

Realisasi anggaran dan realisasi kinerja fisik pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum semua kegiatan yang telah dilaksanakan sangat baik.

4. Saran dan masukan sebagai berikut:

- a. Agar mempertahankan dan meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang.
- b. Untuk pengisian laporan triwulanan Tahun 2017 e-Monev Bappenas berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006:
 - Semua target triwulanan ditetapkan pada triwulan I. Contoh: Triwulan I target yang ditetapkan 25%, Triwulan II = 50%, Triwulan III = 75% dan Triwulan IV = 100%.
 - Tabel Permasalahan diisi apabila belum ada realisasi anggaran, realisasi anggaran lebih besar dari realisasi kinerja fisik atau sebaliknya dan ada revisi anggaran.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan ada kendala tindak lanjut yang diperlukan serta pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.
- c. Mengadakan sosialisasi dan konsultasi terhadap operator baru tentang Aplikasi *e-monev* Bappenas berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 oleh operator lama apabila operator lama pindah bagian atau berhalangan.
- d. Mencari solusi atas penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil evaluasi Laporan Triwulan IV Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Februari 2017
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi



MAHKAMAH AGUNG
DIVISI PERENCANAAN DAN ORGANISASI
YOGYAKARTA

[Handwritten Signature]
Djoko Pribadi

* Keterangan :

- 0% - 69,99% = Kurang Baik
- 70% - 84,99% = Cukup Baik
- 85% - 89,99% = Baik
- 90% - 100% = Sangat Baik



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, Telp.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10110

**EVALUASI ATAS PENYELENGGARAAN DAN HASIL PROGRAM KERJA TERKAIT
TRIWULAN IV TAHUN 2016 BERDASARKAN PP NO. 39 TAHUN 2006
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

Dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Program dan Kegiatan terkait dengan pelaksanaan PP No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Surat Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan No. 9569./Dt.9.1/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Perihal Pengingat Laporan Triwulan IV TA 2016 berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 serta SK Kepala Badan Urusan Administrasi No. 11.c/BUA/SK/I/2012 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Triwulan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan Yang Berada di Bawahnya, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan evaluasi atas Laporan Triwulan IV Tahun 2016, adalah:
 - a. Memberikan informasi tentang Pagu Anggaran dan Penyerapan Anggaran dengan Realisasi Kinerja.
 - b. Memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran dan Realisasi Kinerja.
2. Hasil Evaluasi Laporan Triwulan IV Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Yogyakarta PAGU yang diterima sebesar Rp 23.745.933.000,- sebagai berikut:
 - Realisasi anggaran Rp 23.055.993.455,- (97.09%) sangat baik;
 - Realisasi kinerja sebesar 98.26% sangat baik.

Capaian tersebut di atas merupakan akumulasi jumlah anggaran dan persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja di bawah ini:

No	Kode& Nama Program /Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Kinerja	
			Target (%)	Realisasi Rp, (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	[005.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	23.242.697.000	100.00	22.559.438.195 (97.06)	100.00	97.06
	[1066] Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitrasi	23.242.697.000	100.00	22.559.438.195 (97.06)	100.00	97.06
2.	[005.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	436.800.000	100.00	430.714.560 (98.61)	100.00	98.61
	[1071] Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	436.800.000	100.00	430.714.560 (98.61)	100.00	98.61
3.	[005.03.07] Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	66.436.000	100.00	65.840.700 (99.10)	100.00	99.10
	[1049] Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	66.436.000	100.00	65.840.700 (99.10)	100.00	99.10

3. Berdasarkan tabel tersebut di atas:

Realisasi anggaran dan realisasi kinerja fisik pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum semua kegiatan yang telah dilaksanakan sangat baik.

4. Saran dan masukan sebagai berikut:

- a. Agar mempertahankan dan meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang.
- b. Untuk pengisian laporan triwulanan Tahun 2017 e-Monev Bappenas berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006:
 - Semua target triwulanan ditetapkan pada triwulan I. Contoh: Triwulan I target yang ditetapkan 25%, Triwulan II = 50%, Triwulan III = 75% dan Triwulan IV = 100%.
 - Tabel Permasalahan diisi apabila belum ada realisasi anggaran, realisasi anggaran lebih besar dari realisasi kinerja fisik atau sebaliknya dan ada revisi anggaran.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan ada kendala tindak lanjut yang diperlukan serta pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.
- c. Mengadakan sosialisasi dan konsultasi terhadap operator baru tentang Aplikasi *e-monev* Bappenas berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 oleh operator lama apabila operator lama pindah bagian atau berhalangan.
- d. Mencari solusi atas penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil evaluasi Laporan Triwulan IV Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

h.

Jakarta, Februari 2017
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Doko Poyo Prabadi

* Keterangan :

- 0% - 69,99% = Kurang Baik
- 70% - 84,99% = Cukup Baik
- 85% - 89,99% = Baik
- 90% - 100% = Sangat Baik



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Monitoring & Evaluasi
Keterbukaan Informasi Badan Publik

Komisi Informasi Daerah DIY memberikan penghargaan kepada :

Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sebagai Peringkat Terbaik I

Kategori Lembaga Yudikatif DIY

Yogyakarta, 25 Oktober 2017



Huzwan Iskandar Jaya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

memberikan

Penghargaan

Kepada

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Atas prestasinya sebagai

Harapan I

Penilaian Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan T.A. 2015 Tingkat Wilayah Kategori 1 s.d. 5 Sater

Yogyakarta, 14 Juli 2016



NIP. 196811101989011001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

memberikan

PENCERHAARAN

Kepada

**Pengadilan Tinggi Yogyakarta
(005.03)**

Sebagai

Peringkat III

Penilaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat UAPPA-W Tahun 2016



Yogyakarta, 11 Juli 2017

Kepala Kantor

KEPALA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI DI YOGYAKARTA

LUDIRO

NIP. 196811101989011001



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM. 13 / QMR / SERTIFIKAT / 7 / 2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tipe B

Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Bantul Yogyakarta

Terakreditasi : " B "

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan 5 Juli 2020, dengan rencana audit surveillance pada :

- I. Januari 2018
- II. Juli 2018
- III. Januari 2019
- IV. Juli 2019
- V. Januari 2020
- VI. Juli 2020

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu

WAHYUDIN

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Dr. HERRI SWANTORO

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN : 2015**

7A.72.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				22,95
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				7,57
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1.00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	b	0.75	0.75
				1.75
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	b	0.75	0.54
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	b	0.75	0.54
5	Renstra telah menyajikan IKU	b	0.75	0.54
6	Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0.75	0.54
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	c	0.5	0.36
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	b	0.75	0.54
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	b	0.75	0.54
				3.57
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0.75	0.56
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya	b	0.75	0.56
12	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	b	0.75	0.56
13	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	b	0.75	0.56
				2.25
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				5,84
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0.50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0.50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0.50
				1.50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,76%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0.75	0.47
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	c	0.5	0.31
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0.63
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0.75	0.47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	c	0.5	0.31
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	b	0.75	0.47
				2.66
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	b	0.75	0.56
11	Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya	b	0.75	0.56
12	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	b	0.75	0.56
				1.69

III.	DOKUMEN PERJANIAN KINERJA (12,5%)			9.53
a.	PEMENUHAN PK (2%)			
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	y	1	0.67
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	0.67
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	a	1	0.67
				2.00
b.	KUALITAS PK (6,5%)			
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0.75	0.98
5	PK telah menyajikan IKU	a	1	1.30
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0.75	0.98
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	c	0.5	0.65
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	a	1	1.30
				5.20
c.	IMPLEMENTASI PK (4%)			
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	b	0.75	1.00
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	c	0.5	0.67
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	c	0.5	0.67
				2.33
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)				19.33
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	2.50
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	b	0.75	1.88
				4.38
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)			
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	b	0.75	0.78
4	IKU telah menggambarkan hasil	b	0.75	0.78
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	b	0.75	0.78
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	b	0.75	0.78
7	IKU telah diukur realisasinya	b	0.75	0.78
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	b	0.75	0.78
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	b	0.75	0.78
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	b	0.75	0.78
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	b	0.75	0.78
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	b	0.75	0.78
13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	b	0.75	0.78
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	b	0.75	0.78
				9.38
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)			
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	b	0.75	1.13
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	b	0.75	1.13
17	IKU telah direviu secara berkala	a	1	1.50
18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	b	0.75	1.13
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	c	0.5	0.75
				5.83
C. PELAPORAN KINERJA (15%)				12.50
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			
1	LKjIP telah disusun	y	1	1.50
2	LKjIP telah disampaikan tepat waktu	y	1	1.50
				3.00
II.	KUALITAS PELAPORAN (7,5%)			
3	LKjIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya	y	1	0.94
4	LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	b	0.75	0.70
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	b	0.75	0.70

6	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjelaskan	b	0.75	0.70
7	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	b	0.75	0.70
8	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	b	0.75	0.70
9	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	b	0.75	0.70
10	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	b	0.75	0.70
				5.86
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
11	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	b	0.75	0.84
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0.75	0.84
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0.75	0.84
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	b	0.75	0.84
				3.38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	y	1	0.50
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanannya	b	0.75	0.38
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan	a	1	0.50
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	y	1	0.50
				1.88
II. KUALITAS EVALUASI (5%)				
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB	b	0.75	0.63
6	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi	c	0.50	0.42
7	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap	c	0.50	0.42
8	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi	c	0.50	0.42
9	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja	b	0.75	0.63
10	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	b	0.75	0.63
				3.13
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
11	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	b	0.75	1.13
12	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja	b	0.75	1.13
				2.25
E. CAPAIAN KINERJA (20%)				
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	b	0.75	1.88
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0.75	1.88
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0.75	1.88
				5.63
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	b	0.75	3.13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	c	0.5	2.08
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	c	0.5	2.08
				7.29
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				

74.72



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 30 November 2017

Nomor : 1456 /BP/OT.01.2/11/2017
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

76.23

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Wojo Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25

e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0
---	---	---

4. Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperoleh nilai sebesar **76,23 (BB)** atau **Sangat Baik**.
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 24,46%:**
- 1) Dokumen Renstra 2015-2019 telah disusun dan telah memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah dan telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - 2) Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, serta Renstra telah direviu secara berkala.
 - 3) Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan dan sasaran telah berorientasi pada hasil, serta target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - 4) Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek, serta target kinerja pada PK telah ditetapkan dengan baik, namun dokumen PK belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- b. Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 19,52%:**
- 1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
 - 2) Pada kualitas pengukuran, IKU dan indikator kinerja sasaran telah dapat diukur secara objektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, serta dapat digunakan untuk mengukur kinerja.
 - 3) Pada implementasi pengukuran, IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan IKU telah direviu secara berkala, namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 12,00%:**
- 1) LKjIP telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, dan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada *output/outcome*, namun belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
 - 2) LKjIP sudah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan serta LkjiP telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja sehingga informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan.
 - 3) Informasi yang disajikan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.

d. Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh 7,33%:

- 1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, serta terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan, serta hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi serta belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan secara reguler dan bertahap.

e. Pencapaian Kinerja= Bobot 20% nilai yang diperoleh 12,92%:

Target kinerja *output/outcome* telah dapat dicapai, capaian kinerja *output* lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja *output* dapat diandalkan, namun capaian kinerja *outcome* belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja *outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

a. Perencanaan Kinerja

1. Mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas dan implementasi Renstra sehingga program/kegiatan dapat lebih digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program serta Renstra dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
2. Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

1. Mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran sehingga IKU dapat lebih dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja satker.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja pada LKjIP agar disajikan dengan uraian yang lebih mendalam terutama mengenai faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat capaian kinerja serta cara untuk mengatasinya.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja agar dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi serta dilakukan supervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan secara reguler dan bertahap, sehingga hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi.

e. Pencapaian Kinerja

Agar meningkatkan capaian kinerja *outcome* sehingga capaian kinerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya serta meningkatkan keandalan informasi mengenai kinerja *outcome*.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2016, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



NUGROHO SETIADJI

Tembusan Yt:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kementerian PAN dan RB

KERTAS KERJA EVALUASI
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
 TAHUN : 2016

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				24,48
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				7,93
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1,00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi tujuar, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	b	0,75	0,75
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,54
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	b	0,75	0,54
5	Renstra telah menyajikan IKU	a	1	0,71
6	Indikator kinerja tujuan (cutput/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,54
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,54
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	b	0,75	0,54
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	b	0,75	0,54
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0,75	0,56
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya	b	0,75	0,56
12	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	b	0,75	0,56
13	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	b	0,75	0,56
				2,25
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				6,34
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0,50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0,50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0,50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,47
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	b	0,75	0,47
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0,85
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,47
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	b	0,75	0,47
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	a	1	0,75
11	Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT Unit kerja/satker dibawahnya	b	0,75	0,56
12	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	b	0,75	0,56
				2,97

III. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (12,5%)				10,19
a. PEMENUHAN PK (2%)				
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	y	1	0,67
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	0,67
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	a	1	0,67
b. KUALITAS PK (6,5%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,98
5	PK telah menyajikan IKU	a	1	1,30
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,98
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,98
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	a	1	1,30
c. IMPLEMENTASI PK (4%)				
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	c	0,5	0,67
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan	b	0,75	1,00
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0,75	1,00
				2,67
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)				19,52
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)				
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	2,50
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	b	0,75	1,65
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)				
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	b	0,75	0,78
4	IKU telah menggambarkan hasil	b	0,75	0,78
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	b	0,75	0,78
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	b	0,75	0,78
7	IKU telah diukur realisasinya	b	0,75	0,78
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	b	0,75	0,78
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	b	0,75	0,78
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	b	0,75	0,78
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	b	0,75	0,78
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	b	0,75	0,78
13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	a	1	1,04
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	a	1	1,04
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)				
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	b	0,75	1,14
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	b	0,75	1,14
17	IKU telah direvisi secara berkala	b	0,75	1,14
18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	b	0,75	1,14
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	c	0,5	0,75
				5,25
C. PELAPORAN KINERJA (15%)				12,00
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)				
1	LKjIP telah disusun	y	1	1,50
2	LKjIP telah disampaikan tepat waktu	y	1	1,50
II. KUALITAS PELAPORAN (7,5%)				
3	LKjIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya	y	1	0,94
4	LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	b	0,75	0,70
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	b	0,75	0,70
6	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	b	0,75	0,70

7	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	c	0,5	0,47
8	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	b	0,75	0,70
9	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	b	0,75	0,70
10	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	b	0,75	0,70
				5,63
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
11	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	b	0,75	0,84
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0,75	0,84
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0,75	0,84
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	b	0,75	0,84
				3,38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				
				7,33
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	y	1	0,50
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya	b	0,75	0,38
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan	b	0,75	0,38
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	y	1	0,50
				1,76
II. KUALITAS EVALUASI (5%)				
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/uktlak evaluasi yang selaras dengan pedoman/uktlak evaluasi Menpan dan RB	b	0,75	0,63
6	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompentensi	c	0,50	0,42
7	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan secara reguler dan bertahap	c	0,50	0,42
8	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi	b	0,75	0,63
9	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja	b	0,75	0,63
10	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	b	0,75	0,63
				3,33
II. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
11	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	b	0,75	1,13
12	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja	b	0,75	1,13
				2,25
E. CAPAIAN KINERJA (20%)				
				12,92
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	b	0,75	1,88
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	1,88
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0,75	1,88
				5,63
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	b	0,75	3,13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	c	0,5	2,08
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	c	0,5	2,08
				7,29
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				76,23

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BUA (01)

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI se-DIY

NO.	JENIS BELANJA	2014	2015	2016	2017
		% REALISASI	%REALISASI	%REALISASI	%REALISASI
1 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA					
	B. Pegawai	96,77%	99,88%	96,89%	99,41%
	B. Barang Opr	90,45%	95,85%	99,88%	99,58%
	B. Barang Non Opr	55,37%	88,69%	99,23%	99,95%
	B. Modal	0,00%	99,81%	99,82%	99,98%
	Jumlah 01	95,45%	99,46%	97,09%	99,43%
2 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA					
	B. Pegawai	98,50%	97,78%	94,36%	98,28%
	B. Barang Opr	99,81%	99,50%	98,66%	98,45%
	B. Barang Non Opr	97,93%	69,41%	75,66%	100,00%
	B. Modal	0,00%	99,60%	97,36%	99,60%
	Jumlah 01	98,53%	97,46%	94,45%	98,33%
3 PENGADILAN NEGERI SLEMAN					
	B. Pegawai	100,66%	97,75%	96,88%	98,04%
	B. Barang Opr	97,57%	96,51%	98,73%	97,45%
	B. Barang Non Opr	96,52%	88,70%	91,13%	88,56%
	B. Modal	0,00%	96,25%	99,91%	99,25%
	Jumlah 01	100,34%	97,60%	97,08%	97,99%
4 PENGADILAN NEGERI WATES					
	B. Pegawai	99,29%	98,43%	84,90%	99,83%
	B. Barang Opr	98,42%	94,68%	93,35%	99,90%
	B. Barang Non Opr	98,94%	83,84%	98,01%	99,95%
	B. Modal	0,00%	99,95%	99,91%	99,99%
	Jumlah 01	99,21%	99,16%	91,96%	99,84%
5 PENGADILAN NEGERI WONOSARI					
	B. Pegawai	99,75%	98,72%	91,96%	94,50%
	B. Barang Opr	98,16%	93,36%	89,57%	95,66%
	B. Barang Non Opr	99,24%	71,95%	91,33%	94,41%
	B. Modal	0,00%	99,69%	94,75%	87,02%
	Jumlah 01	99,63%	98,10%	92,56%	92,33%
6 PENGADILAN NEGERI BANTUL					
	B. Pegawai	99,71%	97,03%	96,11%	93,43%
	B. Barang Opr	88,45%	85,36%	86,81%	98,22%
	B. Barang Non Opr	87,00%	25,30%	36,71%	99,88%
	B. Modal	0,00%	99,75%	99,50%	99,58%
	Jumlah 01	98,44%	95,51%	94,79%	94,20%

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BUA (01)
 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI se-DIY

NO.	JENIS BELANJA	2014	2015	2016	2017
		% REALISASI	%REALISASI	%REALISASI	%REALISASI
NO.	JENIS BELANJA	2014	2015	2016	2017
		% REALISASI	%REALISASI	%REALISASI	%REALISASI
1 PT YOGYAKARTA					
	B. Barang (03)	96,79%	98,86%	99,10%	99,47%
2 PN YOGYAKARTA					
	B. Barang (03)	90,72%	92,25%	85,89%	98,78%
3 PN SLEMAN					
	B. Barang (03)	88,98%	95,08%	85,40%	99,09%
4 PN WATES					
	B. Barang (03)	92,56%	90,39%	97,16%	96,89%
5 PN WONOSARI					
	B. Barang (03)	83,52%	82,17%	87,46%	91,49%
6 PN BANTUL					
	B. Barang (03)	87,26%	86,71%	76,68%	96,47%